

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Demokrsdi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutrisman, D. (2020). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Bandung: Guepedia Publisher.

### Jurnal

- Tina, L. (2020). *Kewajiban Partai Politik Lokal Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Kader Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Terhadap Partai Nanggroe Aceh Dan Partai Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Tarsidi, D. Z. (2018). Berfungsiakah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik? Pendidikan Politik, Partai Politik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 50-56.
- Alfarizi, M. S., Harun & Hamdani. (2021). Peran Partai Aceh Untuk Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3).
- Akmal, M., Muchsin, M. A., Jamil, T. M., Yusuf, R., & Saputra, J. (2019). The role of local political parties as political education in north aceh: a study of aceh party. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 731-745.
- Nugraheni, D. (2017). *Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tegal*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Ashar, A. S. (2011) *Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

- Muzaffarsyah, T., Rahman, B., Dameria, E., Rahmatullah, R., & Amalia, K. (2022). Political Marketing Of The Victory Of Suadi YahyaYusuf Muhammad In The 2017 Regional Head Election In Lhokseumawe City. In *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)* (Vol. 3, pp. 00037-00037).
- Muzaffarsyah, T., Rahman, B., & Dameria, E. (2022, March). Analysis of the Political Party Position Decline in District Representative Council (DPRK) in the 2019 Election. In *2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)* (pp. 214-220). Atlantis Press.
- Mardhiah, A., Puspasari, C., Anismar, A., & Mulyadi, M. (2022). Political parties' portrayal attempts in creating an image of Aceh's women politicians. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(2), 560-572
- Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia*, 74, 1-17.
- Rahman, D. A., Abubakar, M. B., & Rizwan, M. (2023). Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh. *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 26-40.
- Jamaluddin, J. (2020). Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 29-47.
- Muttaqin, A. (2019). Demokrasi dan Sistem Kepartaian “Menimbang Partai Lokal di Indonesia”. *AlQisthas; Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(1).
- Abdullah, T., Hamdani & Mulyadi. (2022). The existence of local parties in the perspective of banda aceh citizens. *Internasional Journal of Multidisciplinary research and Growth Evaluation*, 03, 111-118
- Fadhilah, A., Muntasir, M., Zulkarnaen, I., & Hidayat, B. (2022). Konsep Nasionalisme Dalam Pandangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPD PKS Kabupaten Aceh Tamiang). *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 102-127.

## Artikel

Hadi, Mukhtar. 2021. *Memahami Konsep Hegemoni*, [memahami konsep hegemoni | iain metro lampung \(metrouniv.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 22.18.

Isnanto, Bayu Ardi. 2023. *Hegemoni adalah dominasi kekuasaan, ini pengertian, jenis dan contohnya*, [Hegemoni Adalah Dominasi Kekuasaan, Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya \(detik.com\)](#), diakses pada tanggal 15 November 2023

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

*MoU ( Memorandum Of Understanding )* di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka